

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN UTANG LUAR NEGERI NOMOR 4077-IND ANTARA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Oleh :

Ryvanuel Juangsa Simbolon

E1A015144

Otonomi non-akademik perguruan tinggi negeri yang mengakibatkan akses ekonomi masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin sulit setiap tahunnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Terbitnya undang-undang tersebut tidak terlepas dari proyek pendanaan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan World Bank yang berjudul Indonesia Managing Higher Education (IMHERE). Pendanaan ini terwujud dalam beragam perjanjian internasional salah satunya Credit Agreement Number 4077 antara International Development Association (IDA) dan Indonesia.

Penelitian ini membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan World Bank dan dampak dari Credit Agreement No.4077-IND dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara IDA dengan Indonesia sebagai negara anggotanya dan mengetahui bagaimana dampak perjanjian Credit Agreement No. 4077-IND. Metode yang digunakan adalah analisis dan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan penyajian berbentuk teks naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dengan IDA memiliki hubungan keanggotaan secara langsung di mana terdapat hak dan kewajiban di kedua belah pihak dengan hubungan hukum yang bersegi dua. Dampak utama dari Credit Agreement No.4077-IND adalah pembentukan dasar hukum otonomi non-akademik perguruan tinggi negeri yang melanggar perlindungan hak asasi pendidikan yang diakui oleh ketentuan *jus cogens* dalam Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dengan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional.

Kata kunci: **perjanjian utang luar negeri, otonomi non-akademik, *jus cogens***

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW ON THE FOREIGN DEBT AGREEMENT NUMBER
4077-IND BETWEEN INDONESIA WITH
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

By:
Ryvanuel Juangsa Simbolon
E1A015144

The non-academic autonomy of state tertiary institutions results in community economic access to tertiary education is increasingly difficult every year to encourage the Constitutional Court to overturn Law No. 9 of 2009 concerning Educational Legal Entities. The issuance of the law is inseparable from a collaborative funding project between the Ministry of Education and Culture and the World Bank entitled Indonesia Managing Higher Education (IMHERE). This funding is manifested in various international agreements, one of which is the Credit Agreement Number 4077 between the International Development Association (IDA) and Indonesia.

This research gonna tell how the relationship between Indonesia and IDA and the impact of the Credit Agreement No. 4077-IND with the aim to determine the relationship between IDA and Indonesia as a member country and find out how the agreement credit agreement No. 4077-IND. The method used is analysis and descriptive using normative juridical. The data source used is a secondary data source with the presentation in the form of narrative text.

The results showed that Indonesia with IDA has a direct membership relationship where there are rights and obligations on both sides with a two-sided legal relationship. The main impact of Credit Agreement No. 4077-IND is the establishment of a legal basis for the non-academic autonomy of public universities that violates the protection of educational rights that are recognized by the provisions of jus cogens in the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations.

Keywords: foreign debt agreements, non-academic autonomy, jus cogens